Rp10,3 MILIAR DIGELONTORKAN, DINKES DEMAK SIAP BANGUN PUSTU DI TIAP DESA

Sumber Gambar:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvY-44axdF0SoLE_jrJd_9TvZRMvCmvslJ6F-pVcKo0V-3_0WaNh0oXtchX_rLQgh06iU&usqp=CAU

Isi Berita:

ARUSUTAMA.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terus digencarkan. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Demak akan merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Anggaran senilai total Rp10,3 miliar disiapkan, bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Dinas Kesehatan Demak, Ali Maimun, menjelaskan bahwa rencana ini meliputi pembangunan tujuh Puskesmas Pembantu (Pustu), renovasi empat Pustu, serta rehabilitasi dan pembangunan dua Puskesmas besar, yakni Puskesmas Bonang 1 dan Puskesmas Kebonagung.

“Untuk pembangunan fisik dialokasikan dari dana transfer sebesar Rp7,9 miliar, sedangkan untuk renovasi dan rehabilitasi bangunan menggunakan dana DBHCHT sebesar Rp2,4 miliar,” ungkapnya, Rabu (30/4/2025).

Rinciannya, lanjut Ali, Puskesmas Kebonagung mendapatkan alokasi dana rehabilitasi sebesar Rp1,9 miliar, sementara Puskesmas Bonang 1 memperoleh Rp500 juta dari DBHCHT. Pembangunan ini sejalan dengan program nasional Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menekankan pada penguatan layanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Ali menyebut, dalam jangka panjang, setiap desa di Demak akan memiliki fasilitas Pustu. Jika di desa tersebut sudah terdapat Pos Kesehatan Desa (PKD), maka akan difungsikan sebagai Pustu tanpa mengubah status kepemilikannya.

“PKD tetap milik desa, namun akan diperkuat dengan tenaga kesehatan dari Pustu, seperti perawat yang akan melayani setiap hari,” terangnya.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Demak juga memperoleh apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas keberhasilannya meraih peringkat dua dalam program Pelayanan Cek Kesehatan Gratis. Keberhasilan tersebut, menurut Ali, bukan karena strategi khusus, melainkan kesiapan sejak awal.

“Peluncuran program itu Februari, tapi kami sudah mulai sosialisasi sejak Januari,” katanya.

Meski begitu, Dinkes sempat menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya informasi dan kepercayaan. Untuk itu, pihaknya melakukan pendekatan jemput bola dengan menyasar pabrik dan desa-desa agar pelayanan dapat lebih merata.

“Kami harap ke depan masyarakat lebih antusias berpartisipasi, apalagi jika ada program cek kesehatan gratis lagi,” pungkasnya. (Sm)

Sumber Berita:

1. https://arusutama.com/2025/05/01/rp103-miliar-digelontorkan-dinkes-demak-siap-bangun-pustu-di-tiap-desa/, “Rp10,3 Miliar Digelontorkan, Dinkes Demak Siap Bangun Pustu di Tiap Desa”, tanggal 1 Mei 2025.
2. https://jateng.disway.id/read/709483/dinkes-demak-siap-bangun-fasilitas-kesehatan-dengan-anggaran-dbhcht-dan-dana-transfer, “Dinkes Demak Siap Bangun Fasilitas Kesehatan dengan Anggaran DBHCHT dan Dana Transfer”, tanggal 30 April 2025.
3. https://www.jatengnews.id/2025/04/30/dinkes-demak-siapkan-rp-10-3-m-bangun-dan-rehabilitasi-fasilitas-kesehatan/, “Dinkes Demak Siapkan Rp 10.3 M Bangun dan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan”, tanggal 30 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terus digencarkan. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Pemkab Demak akan merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.

Anggaran senilai total Rp10,3 miliar disiapkan, bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  b. Pasal 111
     1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
     2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
  c. Pasal 114
     1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
     2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
        a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
        b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
        c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
     3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
  a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi